

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang memiliki kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia internasional hampir di segala faktor baik politik, ekonomi, militer dan lain sebagainya. Tak jarang pula karena kekuatan yang dimilikinya dan posisinya sebagai Dewan Keamanan tetap PBB negeri Paman Sam ini menganggap dirinya sebagai polisi internasional yang memiliki kecenderungan untuk melakukan campurtangan di negara-negara lain yang sedang terjadi krisis dalam negeri hingga konflik antar negara maupun konflik antar pemerintahan sah yang dianggap diktator dengan rakyatnya sendiri.

Dalam kasus ini, Suriah yang sedang dilanda konflik berkepanjangan antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Basyar Asad yang dianggap otoriter dan sering melakukan pelanggaran HAM dan nilai-nilai kemanusiaan berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Amerika Serikat, bersama beberapa negara Eropa, dan Liga Arab, melakukan intervensi dalam krisis Suriah tersebut dengan melakukan dukungan kepada pihak oposisi untuk menggulingkan kekuasaan Basyar Asad dan menggantinya dengan sistem yang lebih demokratis.

Imbas dari kediktatoran Basyar Asad, sebagian besar rakyat Suriah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Gerakan reformasi yang bermula pada Maret 2011 di Kota Dar'a wilayah Houran secara perlahan berubah menjadi konflik bersenjata antara pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia, China dan

negara Eropa sebagai pendukungnya. secara khusus, penulis menggarisbawahi dukungan Amerika Serikat terhadap oposisi Suriah. Untuk itulah penulis sangat tertarik untuk menulis skripsi ini dengan **“Kepentingan Nasional Amerika Serikat Melalui Dukungannya Terhadap Oposisi Pada Masa Pemerintahan Basyar Asad Di Suriah.”**

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kepentingan Amerika Serikat melalui dukungannya terhadap oposisi di Suriah pada masa pemerintahan Basyar Asad.
2. Mengkaji serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada krisis Suriah di masa pemerintahan Basyar Asad.
3. Sebagai bagian dari bahan referensi dan diskusi para pencinta ilmu dalam membahas kepentingan Amerika Serikat melalui intervensinya di Timur Tengah khususnya di Suriah.
4. Sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

C. Latar Belakang Permasalahan

Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia internasional. Tak jarang pula karena kekuatan yang dimilikinya, Dewan Keamanan tetap PBB yang mengklaim dirinya sebagai polisi internasional ini ikut campur dalam urusan Negara-negara yang sebenarnya bukan termasuk wilayah teritorialnya. Berbagai alasan seperti perang melawan teroris, sering dipakai guna melegalkan aksi yang dilakukannya. Invasi ke Afghanistan yang mengatas namakan perang melawan Al Qaidah hingga penggulingan diktator Irak, Saddam Hussein yang berdalih untuk mengamankan senjata pemusnah masal, adalah beberapa contoh dari kebijakan intervensi Amerika Serikat di kawasan timur tengah. Beberapa revolusi yang sering diistilahkan dengan sebutan Arab Spring yang terjadi di beberapa Negara di kawasan timur tengah dan Afrika Utara juga tak luput dari andil besar negeri Paman Sam tersebut.

Hal yang sama pula di Suriah, Negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden Basyar Asad tersebut kini mengalami masa-masa krisis yang diakibatkan dengan adanya pemberontakan oleh rakyatnya sendiri yang menginginkan Asad untuk turun dari jabatannya karena dianggap otoriter dan banyak melakukan tindak kejahatan kemanusiaan. Dalam krisis Suriah tersebut, dengan sangat tegas Amerika Serikat memberikan dukungannya kepada pihak oposisi karena menganggap pemerintahan Basyar Asad telah melakukan kejahatan kemanusiaan

Sebelum krisis Suriah (2011-2012) berlangsung, hubungan Amerika Serikat sering mengalami pasang surut. Hubungannya sering memanas tetapi juga kadang bisa kembali normal. Hubungan diplomatik kedua Negara sempat memanas bahkan putus pada tahun 2005. Amerika Serikat menarik pulang Duta Besarnya dari Suriah, sebagai protes terhadap pembunuhan Perdana Menteri Libanon, Rafik al-Hariri. Investigasi awal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan keterlibatan sejumlah pejabat Suriah dan Libanon dalam pembunuhan itu. Washington dibawah mantan Presiden George W Bush kemudian menuding pemerintah Suriah mendalangi serangan teror yang menewaskan Hariri dan lebih dari 20 orang lainnya.¹ Situasi Timur Tengah digambarkan semakin panas oleh tekanan keras Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah, yang dituduh memberi suaka kepada Presiden Irak Saddam Hussein dan para pengikutnya. Tekanan itu diperberat oleh tuduhan, Suriah menjadi tempat persembunyian persenjataan kimia Irak.

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di berbagai wilayah di Timur Tengah termasuk Suriah, memunculkan berbagai opini publik internasional yang menganggap bahwa kebijakan negri adidaya tersebut sarat akan berbagai kepentingan. Secara gamblang, Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, menyatakan bahwa AS akan terus ikut campur dan slalu punya peran di Timur Tengah. Obama juga mnyatakan bahwa selama puluhan tahun, AS memiliki sejumlah kepentingan di kawasan ini seperti: kontraterorisme, menghentikan

¹ *Setelah Lima Tahun Tutup, Amerika Buka Kembali Kedutaannya di Suriah*, (diakses 15 April 2012) dalam <http://www.tempointeraktif.com>

penyebaran senjata nuklir, mengamankan perdagangan bebas, menjaga keamanan, dan membela keamanan Israel serta berusaha mendamaikan konflik Arab-Israel.²

Kehadiran Presiden Barack Obama mulai memberi warna baru pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Barack Obama menjanjikan corak kemitraan AS yang baru di Timur Tengah sebagai awal diplomasi yang berakar dari "saling hormat dan berbagi kepentingan". Hubungan AS-Suriah sebagai salah satu negara di Timur Tengah yang telah beberapa tahun terakhir membeku nampaknya akan segera mencair kembali. Tim Obama telah mengakui pentingnya Suriah dan perannya dalam menciptakan sebuah kawasan tanpa konflik yang brutal dan mahal. Dan akhirnya, Amerika Serikat telah mengumumkan akan mengutus seorang duta besar ke Damaskus, sebuah posisi yang telah dibiarkan lowong selama empat tahun.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengambil langkah maju yakni akan membuka kembali kantor kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah, yang sudah lima tahun tutup. Washington kini telah siap untuk kembali menempatkan duta besarnya di Damaskus. Obama akan menunjuk Robert Ford sebagai duta besar di Damaskus. Ford, yang fasih berbahasa Arab, dianggap berpengalaman di wilayah krisis dan saat ini ia menjabat sebagai wakil duta besar di Baghdad.

Awalnya, hubungan kedua negara dimulai pada tahun 1835 ketika Amerika Serikat menunjuk konsulatnya di Aleppo yang ketika itu masih berada di

² *Kepentingan Amerika Serikat Sangat Penting Bagi Rakyat Timur Tengah* (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/05/20/1lh5wl->

bawah kekuasaan Khilafah Utsmani. Setelah kemerdekaan Suriah yang dideklarasikan pada tahun 1946, Amerika Serikat beberapa saat setelahnya segera mendirikan kedutaan besarnya yang terletak di Damaskus. Pada tanggal 7 September 1946, Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Suriah serta menunjuk George Wandsworth salam misi diplomatiknya di Suriah.

Selain itu, Amerika Serikat menjadi salah satu pendukung Resolusi No 242 Dewan Keamanan PBB yang mengharuskan Israel mengembalikan daerah yang direbutnya dalam perang termasuk dataran tinggi Golan kepada Suriah. Dalam hal ini AS bertindak sebagai mediator antara Suriah dan Israel. Dikeluarkannya Resolusi 242 oleh Dewan Kemanan PBB pada 22 November 1967, merupakan suatu prestasi diplomatik dalam konflik Arab-Israel. Resolusi itu menekankan "tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang" dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian, tanah bagi perdamaian. Sebagai ganti ditariknya pasukan dari wilayah Mesir, Yordania, dan Syria yang direbut dalam perang 1967, Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab. Resolusi itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembicaraan-pembicaraan damai antara Israel dan negara-negara Arab yang dimulai di Madrid, Spanyol pada 1991.³

Peran AS sebagai sponsor Konferensi Madrid, Spanyol, Oktober 1991 berhasil membawa Presiden Hafez al-Assad dan Menlu Farouk al-Shara ke Madrid. Konferensi Madrid dilaksanakan melalui pemisahan pembicaraan bilateral antara Israel dan Jordan, Suriah, Lebanon dan Palestina dan negosiasi

³ *Diplomasi Munafik ala Yahudi, Mengungkap Fakta Hubungan AS dan Israel* (diakses pada 14/12/2012) <<http://buk.steff.com/id/ami/antar/Munafik/Resolusi.html>>

multilateral antara Israel dan beberapa negara Arab. Perundingan ini merupakan kesempatan yang sangat strategis untuk mengadakan pembicaraan untuk mengatasi konflik Arab-Israel.

Selama Perang Teluk pada 1990-91, Suriah bekerja sama dengan Amerika Serikat sebagai anggota kekuatan koalisi multinasional. AS dan Suriah juga berkonsultasi secara erat pada Perjanjian Taif, guna mengakhiri perang sipil di Lebanon. Pada tahun 1991, Presiden Suriah Hafez al-Assad membuat keputusan bersejarah untuk menerima undangan Presiden Bush dengan menghadiri konferensi perdamaian Timur Tengah dan terlibat berikutnya dalam negosiasi bilateral dengan Israel. Hubungan Amerika Serikat dengan Suriah semakin meningkat ketika Suriah mengamankan pembebasan sandera Barat yang ada di Lebanon dan menghapus larangan perjalanan bagi orang-orang Yahudi Suriah. Sepanjang pemerintahan Clinton ada beberapa upaya untuk melibatkan rezim al-Assad di Timur Tengah dalam beberapa negosiasi perdamaian.

Sebagai buntut dari serangan 11 September di Amerika Serikat pada tahun 2001, Pemerintah Suriah mulai melakukan kerjasama terbatas dengan AS dalam perang melawan terorisme. Dalam beberapa kasus, intelijen Suriah memperingatkan AS mengenai rencana Al Qaeda yang menyerupai pemboman USS Cole di masa lalu. Pemboman USS Cole adalah serangan bunuh diri terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan rudal perusak USS Cole (DDG-67) pada 12 Oktober 2000 ketika pasukan tentara AS sedang mengisi bahan bakar di pelabuhan Aden, Yaman. Tujuh belas pelaut Amerika tewas dan 30 luka-luka

Acara ini merupakan serangan paling mematikan terhadap kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sejak tahun 1987.

Hubungan ekonomi AS-Suriah cenderung fluktuatif dalam kurun waktu enam puluh tahun terakhir. Hubungan ekonomi bermula setelah kemerdekaan Suriah pada tahun 1945, namun putus ketika terjadi Perang Arab tahun 1967. Ketika itu, Kedutaan Besar AS di Damaskus ditutup dan hubungan ekonomi terhambat sampai tahun 1974. Setelah kembali membaiknya hubungan kedua negara pada tahun 1974, Amerika Serikat, melalui USAID, meluncurkan bantuan dalam bidang ekonomi melalui beberapa program bantuan, termasuk, penilaian sektor pertanian, program listrik pedesaan, dan sistem penyaluran air minum untuk Damaskus. Korporasi Kredit Komoditi (CCC) yang bernaung di bawah Pemerintah AS juga aktif dalam merancang perjanjian untuk memasok Suriah dengan produk pertanian tertentu dengan syarat mudah melalui program PL 480.

Sebenarnya, oleh Amerika Serikat, Suriah masuk dalam daftar sebagai negara sponsor terorisme sejak tahun 1979, termasuk negara yang terkena sanksi ekspor AS dan dianggap tidak layak menerima bantuan AS atau untuk membeli peralatan militer AS. Namun demikian, sampai tahun 2003, Amerika Serikat adalah salah satu dari lima pemasok barang ke Suriah, dengan ekspor AS ke Suriah sebesar US \$ 214 juta dan ekspor Suriah ke AS sebesar US \$ 246.100.000 pada tahun 2003. Ekspor utama AS ke Suriah pada saat itu adalah jagung, mesin, suku cadang, komputer, serta eksplorasi minyak dan peralatan pemboran.

Namun, konsistensi dukungan berkelanjutan Suriah pada terorisme, keterlibatannya di Lebanon, senjata program pemusnah massal dan peran

mendestabilisasi di Irak pada invasi AS di masa pemerintahan George Walker Bush, Suriah dikenakan sanksi perdagangan tambahan melalui Akuntabilitas Suriah dan Aksi Kedaulatan Lebanon(SAA) pada Mei 2004. SAA memberlakukan larangan semua ekspor ke Suriah termasuk lebih dari 10% dari komoditas AS, kecuali untuk produk makanan dan pertanian (terutama jagung, kedelai, dan bungkil kedelai), dan dalam beberapa kasus berupa peralatan komunikasi, dan medis peralatan dan perlengkapan. Sejak pelaksanaan SAA, hubungan ekonomi Suriah-AS berangsur memburu. Ekspor AS ke Suriah turun menjadi US \$ 155 juta pada tahun 2005, dan sebagian besar perusahaan-perusahaan AS telah melakukan divestasi kepentingan bisnis mereka di Suriah.

Hubungan baik tersebut memanas ketika krisis Suriah terjadi dan mengancam kedudukan Presiden Basyar Asad dari tampuk kepemimpinannya. Dukungan Amerika Serikat terhadap pihak oposisi semakin memperjelas posisi AS dalam krisis Suriah tersebut.

Dukungan Amerika Serikat bisa dilihat dari dana hibah yang dikucurkan melalui Menlu AS Hillary Clinton mengucurkan dana hibah sebesar US\$45 juta. Dana sebesar itu, sebanyak US\$30 juta untuk bantuan kemanusiaan dan US\$15 juta lainnya diperuntukkan bagi kalangan oposisi sipil Suriah.⁴ Bahkan secara tegas Hillary Clinton, menyatakan bahwa AS berusaha menekan dengan keras

⁴ *Suriah Terlibat Konflik Kepentingan Negara Besar* (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73513:suriah-terlibat-konflik-kepentingan-negara-besar

terhadap kelompok oposisi Suriah, agar mereka bersatu dengan tokoh, yang dapat diakomodasi bagi kepentingan Barat (Amerika Serikat).⁵

Saat ini, suhu politik di Suriah semakin memanas setelah pemerintah melakukan operasi militer di beberapa kota termasuk di wilayah Khalidiyah provinsi Homs. Peristiwa ini telah mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Kekejaman tersebut mendorong PBB melalui dewan keamanannya untuk mengeluarkan resolusi terhadap Suriah. Namun, resolusi tersebut tidak berhasil karena Rusia dan Cina, selaku dewan keamanan tetap PBB memvetonya. Sementara itu, negara-negara Barat seperti AS, Perancis dan Inggris menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak lagi sah dan menuntut presiden Basyar Asad mundur dari jabatannya. Reaksi internasional tersebut ditanggapi oleh pihak oposisi di Suriah dengan membentuk Dewan Nasional Suriah sebagai wadah pemersatu bagi gerakan oposisi Suriah termasuk gerakan oposisi terbesar Ikhwanul Muslimin. Guna menandingi kekuatan militer pemerintah dan melindungi para demonstran, Riyadh Al-Asad yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin angkatan udara Suriah dibawah pimpinan presiden Asad, membentuk Tentara Pembebasan (*Al-Jays Al-Hurr*). Hal tersebut berakibat pada semakin meruncingnya konflik yang terjadi antara pendukung rezim Basyar Asad dengan kubu oposisi.⁶

⁵ *Tekanan Barat Terhadap Pejuang Oposisi Suriah* (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam <http://www.voaislam.com/counter/intelligent/2012/11/09/21588/tekanan-barat-terhadap-pejuang-oposisi-suriah/>

⁶ *Membaca Konflik Timur Suriah* (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam <http://www.politiklini.go.id/index.php/in/kolom/timur-tengah/669-membaca-konflik-suriah>

Dewan Nasional Suriah yang awalnya bertujuan untuk menggalang aspirasi kelompok oposisi belum sepenuhnya berfungsi justru semakin menemui banyak rintangan baik dalam tataran nasional, regional maupun internasional. Pemerintah Basyar Asad yang didukung dua Negara adidaya, Rusia dan Cina (selain Iran), berusaha untuk melakukan pembasmian terhadap para pemberontak di beberapa wilayah. Rusia dan Cina merupakan dua negara yang mempunyai kepentingan di Suriah. Oleh Rusia, Suriah dianggap sebagai pangsa pasar yang potensial bagi produk persenjataan yang diproduksinya. Selain itu, kota Latakia dan Tartus merupakan basis armada laut Rusia.

Sementara Cina juga berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Suriah yang merupakan Negara importir beberapa komoditi asal negeri tirai bambu tersebut. Sementara itu, kepentingan Iran sangat jelas, tidak saja faktor kedekatan Syiah semata, melainkan juga terkait posisi politiknya di kawasan. Jatuhnya rezim Asad akan membuat Iran kian terintimidasi. Karena itu negara yang dijuluki negeri para Mullah ini tentu tidak ingin kehilangan sekutunya di kawasan.

Sementara itu, Amerika Serikat berserta Liga Arab dan beberapa Negara Eropa secara gamblang mendukung pihak oposisi dan menganggap tindakan yang dilakukan oleh sekutu Basyar Asad sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan dan penindasan terhadap hak asasi manusia. Amerika Serikat, menurut Mohammad Javad Abtahi selaku anggota parlement Iran, berusaha menyelesaikan krisis ekonomi dengan memperluas kehadiran militernya di negara-negara Timur

mengejar tujuan ekonomi dengan mendirikan pangkalan militer di negara-negara regional dalam rangka untuk menebus defisit anggaran mereka, dan mereka mendirikan basis dengan biaya negara-negara regional.⁷ Saat ini, menurut Presiden AS Barack Obama, krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Amerika Serikat adalah krisis ekonomi Amerika yang terburuk sejak Depresi Besar 1930-an.⁸

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Mengapa Amerika Serikat mendukung pihak oposisi pada masa pemerintahan Basyar Asad di Suriah (2011-2012)?”

E. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

Kerangka berfikir merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.⁹ Konsep adalah abstraksi yang mewakili obyek atau fenomena.¹⁰ Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori kepentingan nasional.

7

Iran vs AS: AS Mencari Kepentingan Ekonominya di Timur Tengah (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam <http://www.islamtimes.org/vdch6vnw.23n-vdryt2.html>

⁸ Ibid

⁹ Mochtar Masoed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1990), 219.

¹⁰

Ilmu Hubungan Internasional (Jakarta: LP3ES), 14

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah Negara atau bangsa yang berhubungan dengan sesuatu yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/ bangsa adalah keamanan dan kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan "tujuan nasional". Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional".¹¹

Menurut Morgenthau :

"Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik".

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku inter-nasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami perilaku politik luar negeri suatu negara, di mana negara-negara selalu bertindak untuk tujuan kepentingan nasional. Morgenthau mengatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh,

memertahankan atau memperbesar kekuatan negara.¹² Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara-negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut antara lain kesejahteraan ekonomi.¹³

Singkatnya, setiap kebijakan luar negeri, suatu negara senantiasa mendasarkan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional seringkali dipakai sebagai alat untuk menganalisa, untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional dalam dua aspek, yakni normatif dan deskriptif. Secara normatif, konsep kepentingan nasional mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam hubungannya dengan negara lain. Secara deskriptif, konsep kepentingan nasional dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih.¹⁴

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton:

*"National interest is the fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of a state in foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state's most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic wellbeing."*¹⁵

Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa prioritas kepentingan nasional setiap negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya,

¹² Mochtar Masoed. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989), 146

¹³ Jack C. Plano & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Wawan Juanda. (Bandung: Abardin CV, 1990), 5

¹⁴ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 1988), 136

tergantung pada kebutuhan negara yang bersangkutan. Namun para ahli cenderung menempatkan masalah *survival* dan *self preservation* sebagai prioritas utama. Dan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang vital bagi suatu negara.

Dalam konteks AS, kepentingan nasional yang dicapai AS dari waktu ke waktu adalah: (1) mempertahankan negara AS dan sistem konstitusionalnya, (2) perluasan eksistensi AS dan mempromosikan produk-produknya ke luar negeri, (3) menciptakan suatu tata dunia baru atau sistem keamanan internasional yang *favorable*, (4) mempromosikan nilai-nilai demokrasi AS dan sistem pasar bebasnya.¹⁶

Amerika Serikat memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) di Timur Tengah, baik yang berkaitan dengan *low politics* (dalam hal ini ekonomi) maupun *high politics* (keamanan). Kepentingan ekonomi di dalamnya meliputi kebutuhan akan minyak dan pemasaran persenjataan. Kepentingan keamanan diterjemahkan sebagai *self-defense* Amerika menghadapi kekuatan Islam.

Ketika mayoritas produksi minyak dikendalikan oleh negara-negara Islam, hal tersebut akan memunculkan kekhawatiran Amerika terhadap suplai minyaknya. Minyak kemudian bisa menjadi alat bagi kekuatan Islam untuk menekan Amerika. Untuk itu, sebagai bentuk tekanan Amerika agar negara-negara Islam tidak melakukan hal tersebut, Amerika turut ‘memperkuat’ Israel

¹⁶ Amerika Serikat dan Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (diakses pada tanggal 15 Februari 2013) dalam http://www.scribd.com/document_downloads/direct/26799620?extension=pdf&ft=1279006306<=-1279000016&mkblmeLviGY61e6ibt1e0+1kevd1192m34

sebagai ancaman terdekat dan paling mungkin memicu konflik di kawasan produsen minyak terbesar dunia itu.

Dalam konteks *self-defense*, kembali hubungan yang terjadi adalah kekuatan Amerika Serikat menghadapi kekuatan Islam. Semakin kuat Israel, maka semakin kuat pula pertahanan Amerika. Hal ini disebabkan Israel merupakan tangan Amerika yang berada di wilayah negara-negara Islam. Ketika tekanan dari dunia Islam meningkat, maka dengan segera Amerika bisa bereaksi dengan tekanan balik Israel. Karenanya hingga kini Amerika terus memberikan bantuan kepada Israel.¹⁷

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh P. Anthonius Sitepu, bahwa secara konseptual kepentingan nasional adalah nilai-nilai dasar yang terpelihara dan dipertahankan oleh suatu negara dalam mencapai tujuannya. Kepentingan nasional menyangkut beberapa unsur yaitu: keutuhan wilayah dan bangsa, menjaga sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta peranan suatu negara dalam lalulintas hubungan antar negara.

Menurut K.J. Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional ke dalam 3 klasifikasi:¹⁸

1. *Core values* atau nilai "inti"

Dianggap sebagai sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara. Kepentingan dan nilai "inti" dapat

¹⁷ Hubungan Amerika Serikat-Israel: Ladang Implementasi Realisme, (diakses pada tanggal 19 Februari 2013) dalam http://conformeast.multiply.com/journal/item/10/Hubungan_Amerika_Serikat_Israel_Ladang_Implementasi_Realime

¹⁸ K.J. Holsti, *op.cit.*, p.165

digambarkan sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai “inti” seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik.¹⁹

2. *Middle range objectives* (tujuan jangka menengah)

Biasanya menyangkut kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian. Dalam hal ini mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional.²⁰ Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi tidak akan pernah tercapai hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara tertentu. Hal ini dikarenakan kebanyakan negara hanya mempunyai sumberdaya, jasa administrasi dan keterampilan teknis yang terbatas. Oleh sebab itu, negara harus berinteraksi dengan negara lain. Perdagangan, bantuan luar negeri, akses fasilitas komunikasi, sumber perbekalan dan pasar luar negeri bagi sebagian besar negara penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. *Long range goals* (tujuan jangka panjang)

Merupakan sesuatu yang bersifat ideal, misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Dengan kata lain, tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau

¹⁹ M. J. H. van den Broek, *Kepercayaan Untuk Analisis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983).

ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu. Sementara dalam upaya untuk mengejar tujuan jangka panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali satu sistem internasional menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.²¹

Dalam konteks dukungan Amerika Serikat terhadap oposisi di Suriah, penulis beranggapan bahwa teori ini memiliki korelasi yang sangat relevan jika disesuaikan dengan dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat. Dalam hal ini penulis menggunakan teori kepentingan nasional yang diidentifikasi oleh KJ Holsti yakni: *Core values* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara berupa faktor politik terutama bagi eksistensinya di Timur Tengah melalui kepanjangan tangannya, Israel; *Middle range objectives* berupa kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian melalui eksplorasi sumberdaya alam terutama minyak dan gas; *Long range goals* yang merupakan sesuatu yang bersifat ideal, dalam hal ini berupa misi Amerika Serikat dalam upaya membangun tatanan baru dunia melalui demokratisasi.

1. Faktor Politik

Berdasarkan definisi yang dijabarkan oleh Harold D. Laswell dan A. Kaplan : “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku *Who gets What, When and How*, Laswell

²¹ Ibid. Hal 148

menegaskan bahwa "Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana."²² Pendapat lain mengatakan bahwa politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.²³

Dalam hal ini, konsep pembentukan dan pembagian kekuasaan, seperti yang diungkapkan Harold D. Laswell dan A. Kaplan, berarti adanya pembentukan kekuasaan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di Suriah melalui penggulingan kekuasaan Presiden Basyar Asad. Dengan jatuhnya Asad Amerika Serikat beserta sekutunya mampu untuk memerintah melalui kepanjangan tangannya yakni pemerintah boneka yang dibentuknya. Hal tersebut terjadi pada masa invasi AS sebelumnya ke Irak dan Afghanistan, yakni pada pembentukan pemerintah boneka yang dipimpin oleh Presiden Jalal Talabani dan Hamid Karzai. Selain itu faktor geo-politik juga menjadi pemicu yang mendorong adanya dukungan AS terhadap oposisi di Suriah, yakni keberadaan Israel. Posisi Israel dianggap sebagai kepanjangan tangan dari berbagai kebijakan yang diambil Amerika Serikat. Menurut lembaga studi dan konsultasi Zaituna Center bulan Desember 2012 bahwasanya Gedung Putih akan menerapkan metode untuk melibatkan diri secara langsung dalam proyek-proyek di Timur Tengah dan dalam konflik Israel-Palestina, namun AS akan melakukannya semata-mata untuk kepentingan Israel.²⁴

²² Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

²³ Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1995).

²⁴ *Campur Tangan AS di Timur Tengah Untuk Kepentingan Israel* (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam <http://www.erasmuslim.com/berita/palestina/campur-tangan-as-di-timur-tengah-untuk-kepentingan-israel.htm#.URyV6mc3r3A>

2. Faktor ekonomi

Kepentingan minyak dan gas alam menjadi prioritas utama Amerika Serikat mengingat kedua sumberdaya alam tersebut menjadi sumber energi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat maupun untuk kepentingan industri yang secara tidak langsung akan memajukan perekonomian Negara. Ada 4 tingkatan yang terikat dengan hal ini, yaitu kepemilikan, eksploitasi, kontrol dan penggunaan.²⁵

Amerika Serikat menganggap keberadaan Suriah sebagai negara penghasil minyak yang sangat potensial. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu magnet yang sangat besar atas keberadaan negara-negara barat termasuk AS di Timur Tengah adalah karena kandungan minyak bumi dan gas. Menurut data yang dilansir oleh *Energy Information Agency* (EIA), prospek konsumsi energi dunia akan naik menjadi 71 persen dari tahun 2003 sampai 2030 dan kebanyakan konsumsi ini sebagian besar didapat dari Bahan Bakar Minyak. Dari sumber yang sama pula disebutkan bahwa antara rentan tahun 2005 sampai 2030 konsumsi dunia dan Amerika Serikat terhadap minyak akan naik sebesar 39 persen dan 23 persen.²⁶ Begitu banyaknya permintaan terhadap minyak ternyata tidak diimbangi oleh persebaran sumber minyak yang merata di bumi. Sebagian besar cadangan minyak terdapat di kawasan Timur Tengah, terutama wilayah Teluk Persia. Oleh karena itu kawasan Timur Tengah ini memiliki peran

²⁵ Bambang Sunaryono, *Pengantar Ilmu Politik: Kekuasaan Politik*, (Yogyakarta: diktat kuliah, jurusan Hubungan Internasional, Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)

yang sangat signifikan dan strategis bagi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat.²⁷

3. Faktor ideologi

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata *ideologi* sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "*sains tentang ide*". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.²⁸

Dalam konteks ini, Amerika Serikat hendak menyebarkan ideologi liberalnya melalui berbagai kepanjangan tangannya seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM), hingga system pasar global. Ditilik dari sejarah yang ada, Amerika Serikat, mempunyai rival yang sangat berat pada Negara Uni Soviet yang mengedepankan paham komunis. Tapi setelah berakhirnya perang dingin dan era kemunduran paham komunisme

²⁷ *Kepentingan Barat di Timur Tengah* (diakses pada tanggal 14 Februari 2013) dalam http://muzainiyeh---fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-59281-MBP%20Timur%20Tengah-Kepentingan%20Barat%20di%20Timur%20Tengah.html

²⁸ *Ideologi* (diakses pada tanggal 10 Februari 2013) dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>

tersebut, menurut Samuel Huntington dalam buku *"The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order"*, Amerika Serikat memandang ideologi islam sebagai batu karang yang bisa menghalangi upaya mereka untuk mencapai kepentingannya. Singkatnya, AS menganggap islam sebagai musuh utama pada era sekarang ini.

F. Hipotesis :

Sesuai dengan pokok permasalahan berikut di atas, yakni: "Mengapa Amerika Serikat mendukung oposisi Suriah (tahun 2011-2012)?", berdasarkan kerangka teori yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa: Dukungan Amerika Serikat terhadap pihak oposisi pada masa pemerintahan Presiden Basyar Asad di Suriah mengandung kepentingan nasional yang ingin dicapainya yakni:

1. Bidang politik berupa hegemoninya di kawasan Timur Tengah dan penguatan posisi strategis Israel
2. Bidang ekonomi berupa kepentingan eksplorasi minyak
3. Bidang ideologi berupa upaya melakukan demokratisasi dan membendung kelompok islam fundamentalis

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian dilakukan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian melebur dan wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Batas-batas dari kajian ini akan mencegah timbulnya kekeburan dan kerancuan wilayah yang

dibahas. Adapun jangkauan penelitian ini adalah kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mendukung oposisi pada awal pergolakan politik di Suriah yang dimulai pada bulan Maret 2011 hingga akhir 2012. Akan tetapi tidak menutup juga kemungkinan penulis akan menengok peristiwa-peristiwa sebelumnya di luar masa tersebut yang dapat mendukung penelitian atas penulisan skripsi ini.

H. Metodologi Penelitian

Sebagai sebuah penelitian yang harus dipertanggung jawabkan, dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deksriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian diambil kesimpulan atas fakta-fakta tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, diktat, majalah, artikel, surat kabar dan melalui jaringan Internet.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menuangkannya secara sistematis dalam bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V. Berikut ini uraian singkat yang termuat dalam setiap bab :

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka

pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai dinamika politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, demokratisasi Amerika Serikat , Amerika dalam konflik Israel-Palestina, invasi Amerika Serikat ke Irak.

BAB III akan membahas mengenai krisis Suriah pada pemerintahan Basyar Asad, deskripsi tentang kondisi sosial-politik di Suriah beserta intervensi beberapa Negara besar terutama Amerika Serikat, Rusia dan China.

BAB IV akan membuktikan hipotesa dari skripsi ini yang akan membahas tentang kepentingan Amerika Serikat di Suriah melalui dukungannya terhadap pihak oposisi.

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan penulis dari bab-